



LAPORAN EVALUASI TW I TAHUN 2024



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Triwulan I Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun untuk memenuhi kewajiban instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik dan bebas KKN.

Sangat disadari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disajikan belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimasa yang akan datang.

Malili, April 2024
Kepala Dinas



Drs. H. HAMRIS DARWIS

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Data Umum Organisasi	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Peran Organisasi.....	5
1.4 Isu Strategis	5
BAB. II PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1 Rencana Strategis	6
2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	8
2.3 Penetapan Kinerja.....	10
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2 Realisasi Anggaran.....	36
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103), Dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Selanjutnya dalam rangka mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyusun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 3 bulan (Triwulan I Tahun 2024).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Triwulan I Tahun 2024 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis Triwulan I Tahun 2024 kepada stakeholders guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberikan mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2024 dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.3 Kondisi/Struktur Organisasi

Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistic dan persandian maka tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana yang termaktum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 84 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut: Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur serta Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dipimpin oleh

1. Sekretariat, terdiri dari 3 Sub Bagian:
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Aplikasi dan Informatika terdiri:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda 1 orang;
3. Bidang Telematika dan Persandian terdiri:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda 2 orang;

4. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda 1 orang;
5. Bidang Statistik terdiri:
 - a. Kepala Bidang;

Sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, maka dapat dilihat kondisi organisasi Tahun 2024 berdasarkan kepangkatan dan golongan, jabatan dan tingkat pendidikan.

a. Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Menurut Kepangkatan dan Golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda, Gol IV.c	1 Orang
2	Pembina Tk. I , Gol. IV.b	1 Orang
3	Pembina Gol. IV.a	5 Orang
4	Penata Tk. I, Gol III.d	4 Orang
5	Penata , Gol III.c	3 Orang
6	Penata Muda Tk. I, Gol III.b	4 Orang
7	Penata Muda, Gol III.a	1 Orang
8	Pengatur Tk. I , Gol II.d	2 Orang
9	Pengatur, Gol II.c	1 Orang
10	PPPK	3 Orang
JUMLAH		25 Orang

b. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Jabatan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	Eselon III.b	1 Orang
2	Eselon III.a	1 Orang

3	Eselon III.b	4 Orang
4	Eselon IV.a	3 Orang
5	Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda	3 Orang
6	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	1 Orang
7	Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda (PPPK)	3 Orang
8	Staf Pelaksana	9 Orang
JUMLAH		25 Orang

c. Berdasarkan Pendidikan

Tahun 2024 keadaan pegawai Dnas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata Dua (S2)	6 Orang
2	Strata Satu (S1)	14 Orang
3	D3	2 Orang
4	SMA/STM	3 Orang
JUMLAH		25 Orang

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

1.4.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103), Dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

4.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan Persandian.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan Persandian.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
4. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan Persandian.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan Persandian.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
4. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Isu-isu Strategis/Permasalahan

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan, teridentifikasi beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi antara lain

1. Terdapat kegiatan teknis yang belum dibayarkan pada pihak ketiga karena belum ada penagihan.
2. Proses Pembayaran SPJ juga mengalami kendala karena keterbatasan UP sehingga mempengaruhi efektifitas daya serap anggaran.
3. Pengolahan data pada bidang statistic masih mengandalkan pihak ketiga karena keterbatasan SDM yang ahli dalam bidang statistic.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis atau disebut RENSTRA merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi, Visi, Misi Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya

RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RENSTRA secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting dan strategis dalam suatu organisasi. Dengan kata lain visi merupakan rekonstruksi keadaan yang diharapkan dapat dicapai dimasa yang akan datang.

2.2. Visi dan Misi Tahun 2021 – 2026

Visi Misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mengacu pada visi misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kab. Luwu Timur tahun 2021-2026 yaitu **“Kabupaten Luwu Timur yang**

Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya” Dalam rumusan visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni “berkelanjutan”, “lebih maju”, serta “berlandaskan nilai agama dan budaya”. Ketiga pokok visi ini salingterkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan.

Berkelanjutan mempunyai makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di dalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan dayadukung dan daya tampung lingkungan hidup

Lebih Maju Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar dimasa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah- langkah pelak-sanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi, namun diantara keenam misi tersebut yang terkait dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian adalah misi 4 (empat) seperti yang dapat dilihat dibawah ini:

Misi Ke-4 RPJMD :

“Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik”

Tujuan Ke-4 RPJMD:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani”

Tujuan Sasaran Strategis

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah.

2.3 Sasaran Starategis dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan dan Sasaran Strategis Serta Target Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3.10
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	96.56
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP Kominfo	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,51

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Adapun untuk mencapai tiga sasaran tersebut diatas perlu untuk ditetapkan indikator kinerja sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran utama pada renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 yakni sebagai berikut:

1. Indeks Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Penilaian SPBE dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahun. Evaluasi SPBE dilaksanakan dengan mendasarkan pada Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, semula penghitungan SPBE mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan *good governance* di suatu negara. Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan. Pengertian keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya. Manfaat keterbukaan informasi publik antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktik korupsi. Implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP untuk Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dapat dilihat melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan serta dapat mempertanggungjawabkan hasil atas anggaran yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan. Indikator dari sasaran ini adalah Nilai SAKIP. Nilai SAKIP tersebut diperoleh melalui opini yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap laporan SAKIP tahun-n.

2.4 Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kepada atasan langsung dalam hal ini

Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan dalam hal ini tahun 2024.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis tahun 2024, Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2024.

Adapun Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Adapun Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Adapun Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana Tabel 5 dan Penetapan Target Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana Tabel 6.

Tabel 5.

Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunkas Informatika Statistik dan Persandian Kerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Hasil evaluasi dari Kemenpan RB	Angka	3.10
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Penilaian dari Komisi Informasi provinsi sulawesi Selatan	Angka	96.56
3	Nilai SAKIP Kominfo	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	78,51

Tabel 6.

Penetapan Kinerja Program Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024

No	Nama Program	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pengelolaan Urusan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	%	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Jumlah Informasi Publik yang dipublikasikan	Persentase Informasi daerah yang dipublikasikan	%	100
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika pemerintahan daerah	Persentase OPD yang memanfaatkan aplikasi informatika	%	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya penggunaan data statistik daerah untuk penggunaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase OPD yang mengakses data statistik untuk perumusan perencanaan perangkat daerah	%	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	Persentase kegiatan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah yang dilaksanakan	%	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran dan Analisis Kinerja

Secara Umum Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian memiliki 3 Indikator Kinerja Utama dengan 2 Sasaran.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melaksanakan kegiatannya. Efisien diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau lebih dari target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan efisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Efektifitas adalah perbandingan antara rasio pencapaian outcome dengan ratio pencapaian output dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektif jika pencapaian outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian output, sedangkan in-efektif disebabkan pencapaian outcome lebih rendah dari pada pencapaian output.

TUJUAN I : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

1	<u>Sasaran Startegis 1</u> Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik
----------	--

Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik adalah merupakan Usaha untuk meningkatkan penggunaan atau penerapan digitalisasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah

sebagai bagian dari pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang arsitektur Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Nasional.

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah Nilai akhir dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB).

❖ **Capaian Kinerja sasaran Strategis :**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun		Capaian
			Target 2024	Realisasi 2023	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Angka	3.10	3,05	98.39

Capaian Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2023 yaitu 3.05 dari target 2.50 atau dengan tingkat capaian 122 %. Realisasi Kinerja sasaran Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik pada TW I Tahun 2024 masih menggunakan realisasi capaian Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena capaian untuk penilaian evaluasi Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2024 dilakukan pada TW IV Tahun 2024.

❖ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	2022		2023		Capaian
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi 2023	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Angka	2,25	2,42	107%	2,50	3.05	122%

Tahun 2022 adalah 2,42 atau predikat Cukup, dimana target awal adalah 2,25. Selanjutnya pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mencapai peningkatan dan bahkan melebihi target yang telah ditentukan yaitu mencapai 3,05 atau 122% dari tahun sebelumnya. Terdapat kenaikan

capaian kinerja sebesar 15 % dari tahun sebelumnya.

❖ **Perbandingan Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah**

Target akhir Renstra Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu 3.05 Sementara Untuk Capaian Realisasi Tahun 2024 Triwulan I masih menggunakan capaian Realisasi Akhir Tahun 2023 yakni 3,05 Sehingga Tingkat capaian terhadap target akhir Renstra yaitu 101%. Capaian Tahun 2023 telah melampaui target jangka menengah (Tahun 2026) sebesar 0.5 poin.

Tabel 7

Perbandingan Antara Capaian Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2023			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	persen	2,50	3,05	122% %	3	101%

❖ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja**

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran meningkatnya Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis Elektronik antara lain :

- Tersedianya sarana dan prasarana walaupun cukup memadai
- Kerjasama yang baik dengan semua Organisasi perangkat daerah, puskesmas dan BPP dalam pelayanan koneksi jaringan internet

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut antara lain

:

- Dalam proses pengamanan aplikasi pemerintah daerah biasanya bersifat pasif Dikarenakan menunggu bidang Aptika memberikan aplikasi yang telah dibangun atau dikembangkan.

- Tidak didukungnya sumber daya aparatur yang menguasai Teknik keamanan jaringan
- Kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung keamanan penggunaan Aplikasi.

Alternatif solusi yang dilakukan dalam pencapaian target sasaran tersebut antara lain :

- Diharapkan dengan adanya aplikasi yang telah disediakan saat ini agar dibuatkan dasar hukumnya agar dapat diimplementasikan.
- Melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan aplikasi di lingkup OPD yang menerapkan aplikasi tersebut.
- Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur yang ada saat ini dengan lebih sering melakukan pelatihan teknis terkait kegiatan tersebut
- Penambahan personil yang ahli di bidang jaringan dan TIK.

❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW I TAHUN 2024	REALISASI ANGGARAN S.D TANGGL 31 MARET 2024	
			POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.966.106.000	959.506.250	17.551.140	18.30
01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.435.735.500	690.586.000	78.985.000	11.44
	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	69.886.000	22.926.000	5.925.000	25.44
	2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.365.849.500	667.660.000	73.060.000	10.94
02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	530.370.500	268.920.250	96.566.140	35,91
	1	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	402.708.400	238.589.200	91.962.990	38,54
	2	Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	127.662.100	30.331.050	4.603.150	15,18
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	300.179.400	53.052.500	5.811.000	10,95
01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	300.179.400	53.052.500	5.811.000	10,95

		Kabupaten/Kota				
1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	50.271.000	7.111.000	-	0,00
2		Membangun Metadata Statistik Sektoral	249.908.400	45.941.500	5.811.000	12,65
III		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	89.839.000	32.550.000	24.972.000	76,72
01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	89.839.000	32.550.000	24.972.000	76,72
1		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	89.839.000	32.550.000	24.972.000	76,72
TOTAL BELANJA			3.356.124.400	1.045.108.250	48.334.140	31.14

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Pagu Anggaran Perubahan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan DPA Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur yang mendukung Sasaran I yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis Elektronik sebesar Rp 3.356.124.400,- dengan realisasi sebesar Rp.1.045.108.250,- atau dengan tingkat capaian 31.14 %.

❖ **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik**

Terdapat 3 (Tiga) program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis Elektronik yaitu :

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Adapun beberapa indikator yang menunjang pencapaian program pengelolaan aplikasi informatika yaitu ini :

1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi Internet

Target Perangkat Daerah yang direncanakan terkoneksi internet pada Tahun 2024 adalah 41 Perangkat Daerah dan untuk triwulan I targetnya adalah 41 Perangkat Daerah dan realisasi triwulan I adalah 41 Perangkat Daerah atau 100%. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah OPD yang terakses internet / Jumlah keseluruhan OPD x 100%)”.

2. Persentase ruang publik yang terkoneksi internet

Target ruang publik yang direncanakan terkoneksi internet pada tahun 2024 adalah sebanyak 21 unit area publik dengan rincian 10 ruang publik yang ada di ibu kota kabupaten

dan 11 di ibu kota kecamatan. Untuk target triwulan I adalah 21 area publik dan realisasi triwulan I adalah 21 area publik atau 100%. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Ruang Publik yang terakses internet / Jumlah Ruang Publik yang menjadi sasaran pemasangan jaringan internet x 100%)”.

3. Persentase Puskesmas yang terkoneksi Internet

Target Jumlah Puskesmas yang direncanakan terkoneksi internet pada tahun 2024 adalah sebanyak 17 Puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di kabupaten Luwu Timur. Untuk target triwulan I adalah 17 Puskesmas dan realisasi triwulan I adalah 17 Puskesmas atau 100%. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Puskesmas yang terakses internet / Jumlah keseluruhan Puskesmas yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.

4. Persentase BPP yang terkoneksi Internet

Target Jumlah BPP yang direncanakan terkoneksi internet pada tahun 2024 adalah sebanyak 11 BPP. Untuk target triwulan I adalah 11 BPP dan realisasi triwulan I adalah 11 BPP atau 100%. Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah BPP yang terakses internet / Jumlah BPP yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.

5. Persentase Rumah Dinas Jabatan yang terkoneksi Internet

Target jumlah rumah dinas jabatan yang menjadi target pemasangan jaringan internet kominfo pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 Rumah Dinas Jabatan yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dengan rincian 5 titik yaitu 1 Rujab Bupati, 1 Rujab Wakil Bupati, 1 Rujab Ketua DPRD, 1 Rujab Wakil Ketua I DPRD, 1 Rujab Wakil Ketua II DPRD. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Rumah Dinas Jabatan yang terakses internet / Jumlah Rumah Dinas Jabatan yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.

6. Persentase Aplikasi E- Government yang dibangun

Target jumlah Aplikasi E-Government yang direncanakan dibangun pada tahun 2024 adalah sebanyak 8 unit (aplikasi). Untuk target triwulan I adalah 3 unit (aplikasi) dan telah terealisasi sebanyak 3 aplikasi atau sebesar % .Adapun aplikasi yang telah dibangun yaitu Pengembangan aplikasi SIM-PKM, Pembangunan aplikasi database inovasi dan

aplikasi pendataan kebun kelapa sawit rakyat.

Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Aplikasi E-Government yang dibangun / Jumlah Jumlah Aplikasi E-Government yang direncanakan dibangun x 100%)”.

2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Indikator yang menunjang pencapaian program pengelolaan aplikasi informatika yaitu Persentase OPD yang mengakses data statistik sektoral daerah untuk perencanaan pembangunan. Untuk OPD yang mengakses data statistik sektoral daerah untuk perencanaan pembangunan ditargetkan pada tahun 2024 sebanyak 41 perangkat daerah. Untuk triwulan I pelaksanaan kegiatan ini telah terealisasi 100%. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik sektoral daerah dalam perencanaan pembangunan / Jumlah OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur)”

3. Program Penyelenggraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Indikator yang menunjang pencapaian program Penyelenggraan Persandian untuk Pengamanan Informasi adalah persentase kegiatan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan. Target pada Tahun 2024 untuk Kegiatan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah yang adalah sebanyak 41 perangkat daerah. Target untuk triwulan I adalah 41 perangkat daerah dan telah terealisasi 100% untuk triwulan I. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Aplikasi perangkat daerah yang diamankan / Jumlah perangkat daerah.

Adapun kegiatan dan sub kegiatan pendukung tersebut antara lain :

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja 2024	Target Kinerja TW I	Realisasi Kinerja TW I	% Capaian Realisasi Kinerja TW I
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Domain dan Sub domain se Kabupaten Luwu Timur	100	50	50	50

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0	0
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra Pemerintah daerah	95 unit	95 unit	95 unit	100
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Aplikasi EGovernment yang Dilaksanakan Lingkup Pemerintah Daerah	100	50	50	50
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	8 Unit (aplikasi)	3 unit (aplikasi)	3 Unit (aplikasi)	100
Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	0	0	0
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan	100	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	10 Dokumen	0	0	0
Membangun metadata	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	0	0	0

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi Pemerintah Daerah yang diamankan	100	100	100	100
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	41 perangkat Daerah	41 perangkat Daerah	41 perangkat Daerah	100

1	<u>Sasaran Startegis 2</u>
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik merujuk pada proses atau kondisi di mana akses masyarakat terhadap informasi yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga publik semakin terbuka dan transparan. Tujuan utama dari meningkatnya keterbukaan informasi publik adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah.

❖ **Capaian Kinerja sasaran Strategis :**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun		Capaian
			Target 2024	Realisasi 2023	
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	96,56	96,55	99.98

Capaian Nilai keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yaitu 96,55 dari target 87 atau dengan tingkat capaian 110 %. Realisasi Kinerja sasaran Nilai keterbukaan Informasi Publik pada TW I Tahun 2024 masih menggunakan realisasi capaian Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena capaian untuk penilaian evaluasi Nilai keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dilakukan pada TW IV Tahun 2024.

❖ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Pada Tahun 2022 target nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah 85, realisasi nilai nya 93,84 atau capaian sebesar 110% dibandingkan dengan tahun 2023 target 87, realisasi 96.55 atau capaian

sebesar 111%. Mengalami kenaikan sebesar 1 % dari tahun sebelumnya.

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2022			2023		Capaian
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	85	93,84	110%	87	96.55	111%

❖ **Perbandingan Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah**

Target akhir Renstra Nilai Keterbukaan Informasi Publik yaitu 92 Sementara Untuk Capaian Tahun 2024 Triwulan I masih menggunakan capaian Akhir Tahun 2023 yakni 96.55 Sehingga Tingkat capaian terhadap target akhir Renstra yaitu 104% Capaian Tahun 2023 telah melampaui target jangka menengah (Tahun 2026) sebesar 6 poin.

Tabel 8

Perbandingan Antara Capaian Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2023			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	persen	87	96.55	110%	92	104%

Adapun indikator kinerja yang menunjang pencapaian Sasaran Strategis II dalam rangka meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik disajikan dalam tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Tahun 2024		
	Target	Realisasi TW I	Capaian TW I
Jumlah informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terpublikasi	9.100 Informasi	3.739	41%

❖ Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik antara lain :

- Tersedianya sarana dan prasarana informasi yang memadai
- ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan masyarakat Umum secara aktif menerima, memanfaatkan dan menyebarkan informasi
- Kerjasama yang baik dengan semua Pers dalam hal penyebaran informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut antara lain :

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas

Alternatif solusi yang dilakukan dalam pencapaian target sasaran tersebut antara lain:

- Memaksimalkan realisasi sesuai target yang telah ditentukan sehingga pelaksanaan program/kegiatan sesuai target perencanaan
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan kewajiban khususnya media partner yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Luwu Timur.

❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW I TAHUN 2024	REALISASI ANGGARAN S.D TANGL 31 MARET 20242024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.410.595.920	877.344.175	436.883.646	49,80
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.410.595.920	877.344.175	436.883.646	49,80

1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	82.749.925	22.119.925	7.000.000	31,65
2	Pelayanan Informasi Publik	129.640.250	45.360.200	6.272.646	13,83
3	Layanan Hubungan Media	3.170.882.450	806.182.050	423.611.000	52,55
4	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	27.323.295	3.682.000	-	0,00
TOTAL BELANJA		3.410.595.920	877.344.175	436.883.646	49,80

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Pagu Anggaran Perubahan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan DPA Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur yang mendukung Sasaran II yaitu Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik sebesar Rp, 3.410.595.920- dengan realisasi triwulan I sebesar Rp. 877.344.175,- atau dengan tingkat capaian 49.80 %.

❖ **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik**

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yaitu program Informasi dan Komunikasi Publik yang diukur dengan indicator kinerja Persentase Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah daerah yang dikelola. Adapun kegiatan dan sub kegiatan pendukung Program Informasi dan Komunikasi Publik yaitu :

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja 2024	Target TW I	Realisasi Kinerja TW I	% Capaian Realisasi Kinerja TW I
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Pemerintah Daerah Yang Dipublikasikan Melalui Media dan Kelompok Informasi Masyarakat	100	25	25	25
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	0	0	0

Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	0	0	0
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	30 Layanan	30 Layanan	30 Layanan	100
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	71 Orang	0	0	0

TUJUAN II : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah.

3	Sasaran III Meningkatnya Nilai Sakip
----------	--

Sasaran Strategis dari 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mewujudkan pelayanan umum yang Prima untuk mengukur sasaran yang ketiga ini.

❖ **Capaian Kinerja Sasaran Strategis :**

Indikator dari Sasaran 3 adalah Nilai SAKIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan target indikator yaitu 78,51. Realisasi dari sasaran ini belum dapat tercapai pada Triwulan I karena sementara menunggu penilaian dari Tim Evaluator SAKIP Inspektorat. Nilai SAKIP ini berdasarkan penilaian dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

❖ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Pada Tahun 2022 target nilai Nilai SAKIP adalah 63, realisasi nilainya 64.40 atau capaian sebesar 102% dibandingkan dengan tahun 2023 target 64, realisasi 78,50 atau capaian sebesar 122% Mengalami kenaikan sebesar 20 poin dari tahun sebelumnya.

Sasaran	Indikator Kinerja	Sakip	2022		2023		Capaian
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	

Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	63	64.40	102%	64	78.50	122%
--------------------------	------------------------------	-------	----	-------	------	----	-------	------

❖ Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 9.

Perbandingan Antara Capaian Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2023			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP	persen	64	78.50	122%	70	112%

Dari Data diatas dapat dilihat bahwa Target Nilai LAKIP Dinas Kominfo – SP pada akhir tahun Renstra (target Jangka Menengah) yaitu 70 sementara realisasi sampai dengan tahun 2023 sebesar 78.50 atau dengan Tingkat capaian kinerja terhadap target akhir Renstra sebesar 112%

Pada Triwulan I Tahun 2024 Nilai SAKIP Dinas Kominfo - SP untuk Tahun 2024 belum rilis dari Inspektorat sehingga data capaian kinerja Sasaran 3 masih menggunakan data capaian Tahun lalu.

❖ Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

a) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

- Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan dengan baik;
- Tersusunnya agenda perencanaan dan penganggaran berdasarkan aturan Permendagri 54 Tahun 2010 dan Permendagri 86 tahun 2017
- Tersedianya laporan keuangan dan aset yang dibutuhkan dalam audit atau pemeriksaan;

b) Analisis Penyebab Kegagalan/ Penurunan Kinerja

- Belum Optimalnya Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang

ada di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

- Peralatan dan Perlengkapan kantor belum memadai
- Pengarsipan dokumen yang belum berbasis aplikasi
- Kurangnya kesadaran aparatur dalam hal penegakan disiplin;

c) Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Diperlukan sistem pengarsipan surat menyurat serta Dokumen lainnya yang berbasis Aplikasi
- Monitoring dan Evaluasi terhadap program dan kegiatan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan setiap triwulan
- Melakukan pendataan barang-barang asset kantor secara kontinu sehingga barang yang sudah tidak layak dalam hal operasional kantor dapat dilakukan penghapusan aset dan melakukan penggantian barang yang di usulkan pada tahun anggaran selanjutnya;

❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW I TAHUN 2024	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.163.171.235	2.309.719.087	604.728.868	26,18
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.480.455	47.795.455	4.837.000	10,12
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.099.450	11.559.450	4.837.000	41,84
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.214.450	1.314.450	-	0,00
	3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.300.600	1.525.600	-	0,00
	4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.865.955	33.395.955	-	0,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.920.676.348	1.595.360.000	364.207.968	22,83
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.855.245.348	1.571.360.000	354.872.968	22,58
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65.431.000	24.000.000	9.335.000	38,90

3		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.486.800	6.750.000	-	0,00
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.486.800	6.750.000	-	0,00
4		Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	200.000	200.000	-	0,00
	1	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	200.000	200.000	-	0,00
5		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.804.682	58.428.632	5.646.000	9,66
	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.244.682	16.868.632	-	0,00
	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41.560.000	41.560.000	5.646.000	13,59
6		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.737.950	142.000.000	117.572.255	82,80
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	304.737.950	142.000.000	117.572.255	82,80
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.520.000	3.500.000	-	0,00
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.183.950	4.500.000	925.600	20,57
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.500.000	3.000.000	200.000	6,67
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.920.000	1.000.000	220.000	22,00
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.250.000	10.000.000	8.500.000	85,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW I TAHUN 2024	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	263.045.000	263.045.000	-	0,00
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Jabatan	112.000.000	112.000.000	-	0,00
2	Pengadaan Mebel	10.500.000	10.500.000	-	0,00
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.000.000	139.000.000	-	0,00
4	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	1.545.000	1.545.000	-	0,00
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.850.000	83.700.000	54.677.145	65,33
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	1.300.000	-	0,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.600.000	35.900.000	23.677.145	65,95
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.000.000	46.500.000	31.000.000	66,67
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.890.000	112.440.000	57.788.500	51,39
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.380.000	35.000.000	98.500	0,28
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.510.000	57.440.000	54.200.000	94,36
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	3.490.000	17,45

Anggaran yang ditetapkan pada APBD-Pokok yang mendukung pencapaian sasaran strategis III ini sebesar Rp 4.163.171.235,- dengan realisasi anggaran untuk TW I sebesar Rp 604.728.868,- atau 26.18% dari pagu anggaran.

❖ Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Nilai SAKIP

Adapun kegiatan dan sub kegiatan pendukung sasaran meningkatnya nilai SAKIP yaitu :

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024	Realisasi Kinerja TW I	Realisasi Kinerja TW I	% Capaian TW I
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	25	25	25
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	1	1	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	6	6	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	22	22	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	4	4	100

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)	100	0	0	0
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	0	0	0
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1	0	0	0
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100	100	100	100
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18	3	3	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	2	2	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100	100	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	1	1	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	1	1	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	1	1	100

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	1	1	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	1	1	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	1	1	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	1	1	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	1	1	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	1	1	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	0	0	0
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	5	0	0	0

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor/ bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	29	29	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	1	1	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	2	2	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	1	100

3.2 Realisasi Anggaran

Tahun 2024 pada Triwulan I pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur dianggarkan melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah (APBD) dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp **10.929.891.555,-**, sedangkan realisasi pada Triwulan I sebesar Rp **1.247.946.654,-** atau setara dengan capaian 11,42%. Target Anggaran Kas pada Triwulan I sebesar Rp. **4.232.172.012,-** sehingga capaian realisasi anggaran berdasarkan target anggaran kas yaitu 29,49%. Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 Triwulan I

NO	PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB Masing - Masing Kegiatan (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Maret 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						(6/5*100)	(5 - 6)	(8/5*100)	(4 - 6)	(10/4*100)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.163.171.235	2.309.719.087	604.728.868	26,18	1.704.990.219	73,82	3.558.442.367	85,47
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	YULIANUS, S.Sos	119.480.455	47.795.455	4.837.000	10,12	42.958.455	89,88	114.643.455	95,95
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		56.099.450	11.559.450	4.837.000	41,84	6.722.450	58,16	51.262.450	91,38
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3.214.450	1.314.450	-	0,00	1.314.450	100,00	3.214.450	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		3.300.600	1.525.600	-	0,00	1.525.600	100,00	3.300.600	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		56.865.955	33.395.955	-	0,00	33.395.955	100,00	56.865.955	100,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	YULIANUS, S.Sos	2.920.676.348	1.595.360.000	364.207.968	22,83	1.231.152.032	77,17	2.556.468.380	87,53
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.855.245.348	1.571.360.000	354.872.968	22,58	1.216.487.032	77,42	2.500.372.380	87,57
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		65.431.000	24.000.000	9.335.000	38,90	14.665.000	61,10	56.096.000	85,73
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	YULIANUS, S.Sos	29.486.800	6.750.000	-	0,00	6.750.000	100,00	29.486.800	100,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		29.486.800	6.750.000	-	0,00	6.750.000	100,00	29.486.800	100,00
4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	ARIEF FADILLAH, S.Kom	200.000	200.000	-	0,00	200.000	100,00	200.000	100,00
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah		200.000	200.000	-	0,00	200.000	100,00	200.000	100,00
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	YULIANUS, S.Sos	74.804.682	58.428.632	5.646.000	9,66	52.782.632	90,34	69.158.682	92,45

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		33.244.682	16.868.632	-	0,00	16.868.632	100,00	33.244.682	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan		41.560.000	41.560.000	5.646.000	13,59	35.914.000	86,41	35.914.000	86,41
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	YULIANUS, S.Sos	304.737.950	142.000.000	117.572.255	82,80	24.427.745	17,20	187.165.695	61,42
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.520.000	3.500.000	-	0,00	3.500.000	100,00	5.520.000	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		9.183.950	4.500.000	925.600	20,57	3.574.400	79,43	8.258.350	89,92
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		6.500.000	3.000.000	200.000	6,67	2.800.000	93,33	6.300.000	96,92
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.920.000	1.000.000	220.000	22,00	780.000	78,00	1.700.000	88,54
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		31.250.000	10.000.000	8.500.000	85,00	1.500.000	15,00	22.750.000	72,80
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		250.364.000	120.000.000	107.726.655	89,77	12.273.345	10,23	142.637.345	56,97
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	YULIANUS, S.Sos	293.850.000	83.700.000	54.677.145	65,33	29.022.855	34,67	239.172.855	81,39
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.250.000	1.300.000	-	0,00	1.300.000	100,00	2.250.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		105.600.000	35.900.000	23.677.145	65,95	12.222.855	34,05	81.922.855	77,58
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		186.000.000	46.500.000	31.000.000	66,67	15.500.000	33,33	155.000.000	83,33
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	YULIANUS, S.Sos	263.045.000	263.045.000	-	0,00	263.045.000	100,00	263.045.000	100,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Jabatan		112.000.000	112.000.000	-	0,00	112.000.000	100,00	112.000.000	100,00
	Pengadaan Mebel		10.500.000	10.500.000	-	0,00	10.500.000	100,00	10.500.000	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		139.000.000	139.000.000	-	0,00	139.000.000	100,00	139.000.000	100,00
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya		1.545.000	1.545.000	-	0,00	1.545.000	100,00	1.545.000	100,00
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	YULIANUS, S.Sos	156.890.000	112.440.000	57.788.500	51,39	54.651.500	48,61	99.101.500	63,17
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		75.380.000	35.000.000	98.500	0,28	34.901.500	99,72	75.281.500	99,87

	pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		61.510.000	57.440.000	54.200.000	94,36	3.240.000	5,64	7.310.000	11,88
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		20.000.000	20.000.000	3.490.000	17,45	16.510.000	82,55	16.510.000	82,55
02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		3.410.595.920	877.344.175	436.883.646	49,80	440.460.529	50,20	2.973.712.274	87,19
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	HAYATI ILYAS, SE.MM	3.410.595.920	877.344.175	436.883.646	49,80	440.460.529	50,20	2.973.712.274	87,19
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		82.749.925	22.119.925	7.000.000	31,65	15.119.925	68,35	75.749.925	91,54
	Pelayanan Informasi Publik		129.640.250	45.360.200	6.272.646	13,83	39.087.554	86,17	123.367.604	95,16
	Layanan Hubungan Media		3.170.882.450	806.182.050	423.611.000	52,55	382.571.050	47,45	2.747.271.450	86,64
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		27.323.295	3.682.000	-	0,00	3.682.000	100,00	27.323.295	100,00
03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		2.966.106.000	959.506.250	175.551.140	18,30	783.955.110	81,70	2.790.554.860	94,08
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ARIEF FADILLAH, S.Kom	2.435.735.500	690.586.000	78.985.000	11,44	611.601.000	88,56	2.356.750.500	96,76
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		69.886.000	22.926.000	5.925.000	25,84	17.001.000	74,16	63.961.000	91,52
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		2.365.849.500	667.660.000	73.060.000	10,94	594.600.000	89,06	2.292.789.500	96,91
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	MUHAMMAD ADI SAFAAT, S.Kom	530.370.500	268.920.250	96.566.140	35,91	172.354.110	64,09	433.804.360	81,79
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		402.708.400	238.589.200	91.962.990	38,54	146.626.210	61,46	310.745.410	77,16
	Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		127.662.100	30.331.050	4.603.150	15,18	25.727.900	0,00	123.058.950	0,00
04	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		300.179.400	53.052.500	5.811.000	10,95	47.241.500	89,05	294.368.400	98,06
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	HAERUDDIN, S.Kom	300.179.400	53.052.500	5.811.000	10,95	47.241.500	89,05	294.368.400	98,06
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		50.271.000	7.111.000	-	0,00	7.111.000	100,00	50.271.000	100,00

	Membangun Metadata Statistik Sektoral		249.908.400	45.941.500	5.811.000	12,65	40.130.500	87,35	244.097.400	97,67
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		89.839.000	32.550.000	24.972.000	76,72	7.578.000	23,28	64.867.000	72,20
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ARIEF FADILLAH, S.Kom	89.839.000	32.550.000	24.972.000	76,72	7.578.000	23,28	64.867.000	72,20
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		89.839.000	32.550.000	24.972.000	76,72	7.578.000	23,28	64.867.000	72,20
TOTAL BELANJA			10.929.891.555	4.232.172.012	1.247.946.654	29,49	2.984.225.358	70,51	9.681.944.901	88,58

BAB IV

PENUTUP

Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan I Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 merupakan dokumen yang memuat tentang capaian kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur pada triwulan I Tahun Anggaran 2024. Dokumen ini memberi gambaran tentang capaian dari setiap target yang direncanakan, serta kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target.

Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan ini dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya serta dapat memberi gambaran langkah-langkah percepatan pencapaian target yang telah direncanakan untuk tahun 2024. Laporan Kinerja Triwulanan ini sangat mempermudah dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.

Semoga Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Malili, April 2024

KEPALA DINAS,



Drs. H. Hamris Darwis

Pangkat :Pembina Utama Muda

NIP. :196411191990031008

L

A

M

P

I

R

A

N



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Telepon : (0474) 321 337 Faks : (0474) 321 337
Email: kominfo@luwutimurkab.go.id

Malili, 06 Mei 2024

Nomor : 000.1.1/133 /Diskominfo-SP
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada
Yth. Sekretaris, Kabid, PPTK dan Staf
di-
Tempat

Sehubungan dengan hasil pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Triwulan I 2024, maka di undang kepada saudara/i untuk menghadiri rapat evaluasi kinerja Triwulan I yang Insyaallah akan dilaksanakan:

Hari/Tanggal : Selasa, 06 Mei 2024

Waktu : 9.00 Wita - Selesai

Tempat : Ruang Bidang Telematika, Informatika Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur.

Demikian disampaikan perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

Drs. H. HAMRIS DARWIS
Kepala Pembina Utama Muda/IV-c
NIP. 19641119 199003 1 008

Tembusan kepada Yth.:

7. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) *di Malili*;
8. Ketua DPRD Luwu Timur *di Malili*;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, *di Malili*



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Kodepos 92961

Email : Kominfo@luwutimurkab.go.id

Tanggal : 6 Mei 2024
Tempat : Ruang Pidana Telematika

ABSEN RAPAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN	KETERANGAN
		L	P		
1					
2	Yusuf	L			
3	Harun	L			
4	Arief Fadlillah A	L			
5					
6	Amir	L			
7	Rafiq Nasir		P		
8	Darwin HD	L			
9	Hayati Uyan		P		
10	Albertu		P		
11	INDRAYATI		P		
12	Herdianti		P		
13	INNA Yunita		P		
14	A. Indrawati A.		P		
15	M. Azam		P		
16	Friani		P		
17	Hari Aditya	L			
18	Albar Syarif	L			
19	Dedi Setiawan	L			
20	Muhammad Syarif	L			

27	Ariar	✓			
28	Budaya	✓			
29	A. Purnadani	✓			
30	A. S. S.		✓		
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					

Kepala Dinas



Dr. H. HAMRIS DARWIS
 Pangkat Pembina Utama Muda/ IV-c
 NIP. 19641119 199003 1 008





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DI EVALUASI ATAS KINERJA KEPALA
DINAS BIDANG SEKRETARIATAN TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Sekretariat atas pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Subtansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil evaluasi kami ~~terdapat~~/ tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, April 2024

Kepala Dinas,

Drs. H. HAMRIS DARWIS

Pangkat/Gol.: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19641119 199003 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DI EVALUASI ATAS KINERJA KEPALA
DINAS BIDANG STATISTIK TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Sekertariat atas pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Subtansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil evaluasi kami ~~terdapat~~/ tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, April 2024

Kepala Dinas,

Drs. H. HAMRIS DARWIS

Pangkat/Gol.: Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19641119 199003 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DI EVALUASI ATAS KINERJA KEPALA
DINAS BIDANG INFORMASI KOUNIKASI PUBLIK TRIWULAN I
TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Sekertariat atas pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Subtansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil evaluasi kami ~~terdapat~~/ tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, April 2024

Kepala Dinas,

Drs. H. HAMRIS DARWIS

Pangkat/Gol.: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19641119 199003 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DI EVALUASI ATAS KINERJA KEPALA
DINAS BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA TRIWULAN I
TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Sekertariat atas pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Subtansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil evaluasi kami ~~terdapat~~/ tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, April 2024

Kepala Dinas,

Drs. H. HAMRIS DARWIS

Pangkat/Gol.: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19641119 199003 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DI EVALUASI ATAS KINERJA KEPALA
DINAS BIDANG TELEMATIKA TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Sekertariat atas pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Subtansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil evaluasi kami ~~terdapat~~/ tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, April 2024

Kepala Dinas,

Drs. H. HAMRIS DARWIS

Pangkat/Gol.: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19641119 199003 1 008